

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak;

Prosedur Penyelesaian Permohonan Pasal 36 (1) Huruf a Undang-Undang KUP tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Kekhilafan Wajib Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 – 2019;

Tim Redaksi Kanwil DJP Jawa Tengah I. **Buku Tahunan”Jateng Satu Berpadu”**;

Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Sorongan, V.V, Saerang, D.P.E. dan Alexander, S. (2016). *Analisis Proses Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Suluttenggo Malut*. Jurnal Vol 16 No.01. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Utami, Cindy Dwi dan Devano, Sony (2015). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Leba, Elizabeth Hilda Yuliani (2016). *Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

www.pajak.go.id diakses pada tanggal 5 Februari 2017 dan 31 Maret 2017.